

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN



Sektor perikanan harus menjadi salah satu sektor prioritas yang perlu diakselerasi kinerjanya, dalam konteks mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan pada besarnya kontribusi sektor ini terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (sebesar sebesar 19,57 persen), ada sebanyak 9,7 juta jiwa penduduk Indonesia yang menggantungkannya di sektor ini dan besarnya potensi ekonomi sektor ini, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan.

SEKILAS PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR PERIKANAN



- Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB terus meningkat setiap tahunnya. Tetapi pertumbuhan 2 (dua) tahun terakhir melambat

- Produksi sektor perikanan terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur dengan nilai tukar nelayan (NTN). Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari masih banyaknya permasalahan-permasalahan krusial yang dihadapi oleh nelayan.



MASALAH-MASALAH KRUSIAL DI SEKTOR PERIKANAN

• KETERBATASAN KEMAMPUAN DAN AKSES PERMODALAN

Keterbatasan permodalan menjadi salah satu penyebab masih rendahnya produktivitas nelayan, sulitnya nelayan untuk upgrading tonase kapal beserta peralatannya, sulitnya meningkatkan skala usaha, dan nelayan menjadi pihak yang lebih tidak diuntungkan dibandingkan *middle man*.



• OVERFISHING DAN KEBERLANJUTAN SEKTOR PERIKANAN

Sebagian wilayah perikanan Indonesia sudah mengalami penangkapan berlebih (*overfishing*). Kondisi ini mengancam keberlanjutan sektor perikanan kedepannya.



• BAHAN INPUT BUDIDAYA IKAN IMPOR DAN MAHAL

Masalah yang dihadapi oleh pembudidaya ikan di wilayahnya adalah bibit dan pakan yang masih bergantung dari impor dan harganya mahal



• NELAYAN KECIL DAN BURUH NELAYAN BUKAN PIHAK YANG PALING DI UNTUNGAN

Mekanisme pasar (penentuan harga) saat ini menempatkan nelayan kecil dan buruh nelayan menjadi pihak yang tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar di dalam rantai ekonomi perikanan, dibandingkan *middle man*.



• RENDAHNYA KAPASITAS SDM NELAYAN

Rendahnya kapasitas SDM Nelayan berdampak pada aktifitas dan kemampuan nelayan yang bersifat homogen dan tradisional.



• KETERBATASAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Modernisasi dan pemanfaatan teknologi masih menjadi kendala yang dihadapi oleh nelayan, khususnya nelayan kecil.



• REGULASI YANG MENGHAMBAT

Urusan perikanan dan kelautan yang dibagi antar tingkatan Pemerintah berdasarkan batas wilayah administrasi dinilai sangat tidak efektif akhirnya merugikan nelayan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan



EVALUASI DUKUNGAN ANGGARAN MELALUI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan dukungan anggaran yang bersumber dari belanja pemerintah pusat dalam APBN sudah diberikan oleh Pemerintah, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan juga di berbagai jenis program, baik secara langsung ke sektor perikanan maupun tidak namun masih terdapat banyak kendala dalam realisasinya.



• MASIH RENDAHNYA KUR KE SEKTOR PERIKANAN



Proporsi KUR yang disalurkan oleh lembaga jasa keuangan perbankan ke sektor perikanan sangat kecil sekali, yakni hanya 1,22 persen di tahun 2016 dan 1,65 di tahun 2017. Padahal, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh nelayan adalah keterbatasan pemodal.

• DANA BERGULIR BELUM OPTIMAL SENTUH SEKTOR PERIKANAN

Dana bergulir disalurkan bagi koperasi dan UMKM yang memiliki badan hukum. Di sisi lain, koperasi nelayan aktif hanya 382 unit atau 0,2 persen dari total seluruh koperasi di Indonesia dan tidak banyak nelayan kecil memiliki usaha berbadan hukum.



• SUBSIDI SOLAR TIDAK OPTIMAL BANTU NELAYAN



Keberadaan subsidi solar ini menjadi tidak begitu bermanfaat bagi nelayan-nelayan kecil dengan kapasitas kapal dibawah 10 gross ton (GT). Nelayan kerap tidak dapat memperoleh pasokan solar bersubsidi di SPDN/SPBN pada saat mereka membutuhkan.

• PROGRAM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) BELUM OPTIMAL

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) tahun 2017 di berbagai tempat hanya sebesar 55,23% dari pagu Rp771,8 miliar.

• ASURANSI NELAYAN BERMANFAAT, TAPI BELUM OPTIMAL



Nelayan sulit melanjutkan pembayaran tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya. Pemahaman nelayan atas kewajiban nelayan untuk membayarkan premi tahun berikutnya juga masih rendah

• BANTUAN KAPAL DAN ALAT TANGKAP TIDAK MAKSIMAL

Masih banyak bantuan kapal dan alat tangkap tidak digunakan oleh masyarakat nelayan dan tidak sesuai dengan spesifikasi apa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis pesisir yang berbeda-beda.



REKOMENDASI

Mendorong pendirian dan penguatan koperasi nelayan

Penguatan kapasitas SDM nelayan

Pembentukan badan logistik perikanan

Melakukan review dan perbaikan aturan perundang-undangan yang memberatkan nelayan kecil

Peningkatan penerapan teknologi sesuai dengan kondisi sosial budaya pada setiap daerah.

Mendorong pemanfaatan dana desa yang difokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.